

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP**

SKRIPSI

**WAHIDAH
NIM : 1460302243**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2018**

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

**WAHIDAH
NIM : 1460302243**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Pada Pemerintah Kabupaten Pangkep"

Nama Mahasiswa : WAHIDAH

Nomor Induk Mahasiswa : 1460302243

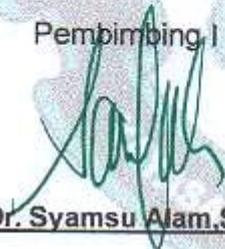
Program Studi : Manajemen/Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, maka skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disetujui

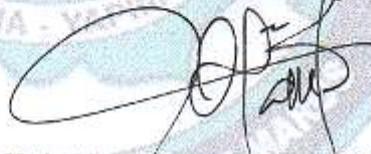
Maros, 25 Juli 2018

Pembimbing I



Prof.Dr. Syamsu Alam,S.E.M.Si

Pembimbing II



Muh.Alam Nasyrh Hanafi,SE.,S.Pd.,MM.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros



Dr. Dahlan, SE., MM.

HALAMAN PENGESAHAN

Pada Hari Ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**

Judul Pengesahan : "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pangkep"

Nama Mahasiswa : WAHIDAH

Nomer Induk Mahasiswa : 1460302243

Program Studi : Strata Satu (S1)

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Telah diujikan dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros **Nomor:019/SK/S1/FEB-UMMA/VII/2018** tanggal 25 Juli 2018 untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Panitia Ujian:

Ketua : Dr. Dahlan, S.E, M.M

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Ishlah Idrus, S.E.,M.Si

Anggota 1. Nurwahidah, S.E., M.Si

2. Ibriati Kartika Alimuddin, S.E.,M.M



Handwritten signatures of the exam committee members, including the Chairman (Dr. Dahlan), Secretary (Dr. H. Muhammad Ishlah Idrus), and two members (Nurwahidah and Ibriati Kartika Alimuddin).

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 : Jl. Dr. Ratulangi No. 62 Maros Sulawesi Selatan, telp. (0411) 8998018 e-mail: ummayapim2015@gmail.com Kode pos 90511
Kampus 2 : Jalan Poros-Pammelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wahidah
NIM : 1460302243
Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Alamat : Pulau Karanrang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data penelitian yang saya ajukan untuk diujiakan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Maros (FEB UMMA) adalah BENAR bebas dari plagiat, dan apabila di temukan data yang saya ajukan tidak benar maka saya bersedia di berikan sanksi administratif, Akademik dan Hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Maros, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



Wahidah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, yang maha Esa, yang telah membuka dan mencurahkan pintu rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Universitas Muslim Maros.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tentunya bukan atas prakarsa penulis sendiri. Berbagai bantuan moral, saran dan kritikan yang membangun serta dukungan moril senantiasa penulis dapatkan dari rekan-rekan dan para dosen pengajar dan dosen pembimbing dan tak lupa pula kepada kedua orang tua (Bapak Abd.Munir dan ibu Halima) dan saudara-saudaraku tersayang yang senantiasa memberi dukungan serta semangat dan do'a yang tentunya menjadi salah satu faktor keberhasilan atas penulisan skripsi ini dalam tercapainya gelar strata 1 (S1).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan salam hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Ikram Idrus, M.S. selaku ketua Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM).
2. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Bapak DR. Dahlan, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muh. Alam Nasyrhan Hanafi, SE.,S.Pd.,MM., selaku dosen pembimbing II yang memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf Universitas Muslim Maros yang tak sempat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pangkep dan segenap Staf ASN terkait yang telah membantu dalam pengumpulan data-data yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan dalam dunia akademik yang mulai dari awal sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Penulis dengan tulus dan ikhlas memohon kepada Allah SWT, untuk membalas budi dan memberikan berkah serta rahmat yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis dengan segala kerendahan hati berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memohon kepada Allah SWT, untuk kesuksesan di masa yang akan datang.

Maros, Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

WAHIDAH. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep* (dibimbing oleh Syamsu Alam dan Muh. Alam Nasyrah Hanafi).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kemampuan Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep tahun 2013-2017 dilihat dari: (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Rasio Efektivitas PAD, dan (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang, karena rata-ratanya sebesar 11,69% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 13,64% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Pangkep sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 103,75%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Pangkep sebesar 95,75%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

WAHIDAH. *Analysis of Local Financial Capacity at Government of Pangkep Regency* (Supervised by Syamsu Alam and Muh Natural Nasyrhan Hanafi).

This research aims to analyze the financial capability of BPKD Kabupaten Pangkep in 2013-2017 from: (1) Fiscal Decentralization Degrees, (2) Ratio of Regional Financial Independence, (3) LGR Effectiveness Ratio, and (4) Ratio of Regional Financial Efficiency.

This research was a descriptive quantitative. This research was conducted at the Regional Finance Management Board of Pangkep Regency. Data collection used documentation method. The data analysis techniques used descriptive quantitative with the formula: Fiscal Decentralization Degrees, Regional Financial Independence Ratio, LGR Efficiency Ratio, and Regional Financial Efficiency Ratio.

The results of the analysis show that the Financial Performance of BPKD of Pangkep Regency is observed from (1) The Fiscal Decentralization Degrees Degree can be categorized as less, because the average is 11.69%, (2) The Regional Financial Independence Ratio relation pattern is still classified in the pattern of instructive relationship because the average the magnitude of this ratio is 13.64%, (3) Effectiveness Ratio LGR effectiveness of financial performance Pangkep district has been effective because the average effectiveness above 100% i.e 103.75%. (4) Regional Financial Efficiency Ratio can be said to be less efficient because the average financial efficiency of Pangkep Regency is 95.75%.

Keywords: Local Government Financial Performance, Fiscal Decentralization Degrees, Regional Financial Independence Ratio, LGR Efficiency Ratios, and Regional Financial Efficiency Ratios.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah | 7 |
| 1. Pengertian Kemampuan Keuangan Otoda | 9 |
| 2. Tujuan Pengukuran Kemampuan Keuangan Otoda | 10 |
| 3. Indikator Kemampuan Keuangan Otoda..... | 10 |
| B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 11 |
| 1. Laporan Realisasi Anggaran | 12 |
| 2. Neraca | 14 |
| 3. Catatan Atas Laporan Keuangan..... | 14 |
| C. Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah | 14 |
| 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal | 15 |
| 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | 16 |
| 3. Rasio Efektivitas PAD..... | 18 |
| 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah | 20 |
| D. Penelitian Terdahulu | 21 |
| E. Kerangka Pikir..... | 22 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tempat dan Waktu Penelitian | 24 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 24 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| D. Metode Analisis Data | 25 |
| E. Definisi Operasional Variabel..... | 29 |
| | |
| BAB IV SEJARAH SINGKAT KABUPATEN PANGKEP | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 30 |
| B. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian | 32 |
| C. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pangkep | 39 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 40 |
| B. Pembahasan..... | 48 |
| | |
| BAB VI SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 61 |
| B. Saran | 61 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| No | Halaman |
|--|---------|
| 1. Tabel 1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal | 16 |
| 2. Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah | 18 |
| 3. Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kemampuan Keuangan | 20 |
| 4. Tabel 1. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal | 26 |
| 5. Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah | 27 |
| 6. Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kemampuan Keuangan | 28 |
| 7. Tabel 5.1. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2015 | 40 |
| 8. Tabel 5.2. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2017 | 41 |
| 9. Tabel 5.3. Realisasi APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2015 | 42 |
| 10. Tabel 5.4. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2017 | 42 |
| 11. Tabel 5.5. Penghitungan Rasio DDF BPKD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017 | 44 |
| 12. Tabel 5.6. Penghitungan Rasio KKD BPKD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017 | 45 |
| 13. Tabel 5.7. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD BPKD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017 | 47 |
| 14. Tabel 5.8. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017 | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Halaman |
|--|---------|
| 1. Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir | 23 |
| 2. Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep | 39 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2013-2014 66
2. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2014-2015 68
3. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2015-2016 70
4. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2016-2017 72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemerintahan umumnya dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Otoda) tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

PP Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 antara lain mengatur tentang lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan kemandirian BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan, akses pemeriksa terhadap informasi, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern, hasil pemeriksaan dan tidak lanjutnya dan pengenaan ganti kerugian Negara, termasuk saksi pidana baik yang dapat ditunjukan kepada pihak yang diperiksa maupun pemeriksa.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2010: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk

menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Pengukuran kemampuan keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kemampuan dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kemampuan khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Pangkep, karena itu Pemerintah Kabupaten Pangkep sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Pangkep berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Adapun fenomena yang terkait dengan anggaran yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, biasanya tidak tepat waktu, karena aturan batasan

penyerahan anggaran itu antara tanggal 10 sampai tanggal 20 dalam kurun waktu 6 bulan sekali, akan tetapi kecil kemungkinan penyerahan anggaran itu antara tanggal 10 sampai tanggal 20.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Pangkep antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kemampuan keuangan pada BPKD Kabupaten Pangkep dengan menerapkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep ditinjau dari teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah untuk menganalisis kemampuan keuangan BPKD Kabupaten Pangkep.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis kemampuan keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, untuk menganalisis kemampuan keuangan BPKD Kabupaten Pangkep.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo,2010:60-61).

Menurut Sijabat *et al.* (2013) kemampuan keuangan daerah adalah tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang di ukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Sijabat, 2013: 236-242).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan,

kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran Kemampuan yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran Kemampuan sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kemampuan yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986: 99):

a. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

b. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya

dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

d. Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Tujuan Pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan (Mardiasmo, 2002: 121):

- a. Memperbaiki Kemampuan Pemerintah Daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim 2007:230):

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

3. Indikator Pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kemampuan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kemampuan Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

f. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori :
 - 1) Pendapatan asli daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
 - 2) Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang di alokasikan pada daerah untuk membiyai kebutuhan dananya.
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan

tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- 1) Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.
 - a) Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.
 - b) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi :
 - a) Sumber penerimaan daerah, yaitu :
 - a. Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu.
 - b. Penerimaan pinjaman dan obligasi.
 - c. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
 - d. Transfer dari dana cadangan.
 - b) Sumber pengeluaran daerah, yaitu:

- a. Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
- b. Penyertaan modal.
- c. Transfer ke dana cadangan.
- d. Sisa lebih anggaran tahun sekarang.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

C. Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian Kemampuan keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah

dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231). Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah (Halim, 2007: 232) adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kemampuan Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kemampuan Keuangan Daerah yang antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD

dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

| Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal | Kemampuan Keuangan Daerah |
|---|----------------------------------|
| 00,00 – 10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01 – 20,00 | Kurang |
| 20,01 – 30,00 | Cukup |
| 30,01 – 40,00 | Sedang |
| 40,01 – 50,00 | Baik |
| > 50,00 | Sangat baik |

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
 PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
 TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: bagi hasil

pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001 : 262). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Sangat Rendah | 0% - 25% | Instruktif |
| Rendah | 25% - 50% | Konsultatif |
| Sedang | 50% - 75% | Partisipatif |
| Tinggi | 75% - | Delegatif |

Sumber : Abdul Halim (2007:169).

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin

tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik Kemampuan pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti kemampuan keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan

itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim 2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kemampuan Keuangan

| Kriteria Efisiensi | Persentase Efisiensi |
|--------------------|----------------------|
| 100% ke atas | Tidak Efisien |
| 90% - 99% | Kurang Efisien |
| 80% - 89% | Cukup Efisien |
| 60% - 79% | Efisien |
| Kurang dari 60% | Sangat Efisien |

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah dilakukan oleh Ana Dwi Kurniawati (2004) dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo”. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo dari sisi keuangan belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap TPD yang rendah sekali baik pada era sebelum maupun sesudah otonom daerah. Tingkat kemandirian Kabupaten Sukoharjo hanya sebesar 12,65% dengan pola hubungan instruktif, sedangkan rasio PAD dan Bagi Hasil terhadap TPD baik pada era sebelum dan sesudah otonomi daerah masih sangat kecil.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Harmanto Yuandhi Wibowo (2006) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 1996/1997-2005)”. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen belum mampu secara keuangan dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini terlihat dengan besarnya proporsi PAD terhadap TPD yang tergolong rendah baik sebelum maupun pada masa otonomi daerah. Dimana rasio PAD rata-rata sebelum otonomi daerah adalah 15,21% dan rata-rata pada masa otonomi daerah sebesar 9,45%. Adapun tingkat kemandirian daerah hanya sebesar 10,68% pada masa otonomi daerah dengan pola hubungan instruktif.

Alfian Mujiwardhani (2008) juga melakukan penelitian tentang keuangan daerah dengan judul “Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap (Tinjauan Keuangan Daerah)”. Hasil yang diperoleh melalui penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Cilacap masih rendah. Besarnya hanya mencapai 12,91%. Ini menunjukkan pola hubungan instruktif, dimana pemerintah pusat peranannya lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ditinjau dari Rasio APBD. Ada 2 metode yang digunakan yaitu

metode *Time Series* yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Metode *Cross Section* terdiri dari beberapa rasio seperti: Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio *Debt Service Coverage Ratio*. Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2007 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada tahun 2018.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah untuk memahami, dan menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pangkep dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, dan

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada skema di bawah ini:



Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin No.7, Km 3 Kantor Bupati Pangkep, Gedung D Lantai.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan yang telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat verbal bukan angka.

Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa hasil wawancara mengenai gambaran umum objek penelitian diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep.

b. Data kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kemampuan Keuangan pada BPKD Kabupaten Pangkep jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data berupa angka-angka yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh diluar BKPD Pangkep berupa dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada pada instansi melalui metode dokumentasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen- dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode Dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari BPKD Kabupaten Pangkep berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa:

1. Gambaran umum Kabupaten Pangkep.
2. Gambaran umum Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangkep.

Dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2013-2017.

D. Metode Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-

perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Tolak ukur yang digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD.

Tabel 1. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

| Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal | Kemampuan Keuangan Daerah |
|---|----------------------------------|
| 00,00 – 10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01 – 20,00 | Kurang |
| 20,01 – 30,00 | Cukup |
| 30,01 – 40,00 | Sedang |
| 40,01 – 50,00 | Baik |
| > 50,00 | Sangat baik |

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
 PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
 TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

2. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Formula rasio kemandirian menurut Mahsun (2009) adalah sebagai berikut

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

| Kemampuan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|------------------|------------------------|----------------------|
| Rendah | 0% - 25% | Instruktif |
| Sekali | 25% - 50% | Konsultatif |
| Rendah | 50% - 75% | Partisipatif |
| Sedang | 75% - 100% | Delegatif |

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah :

- d. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- e. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- f. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kemampuan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti Kemampuan pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kemampuan Keuangan

| Kriteria Efisiensi | Persentase Efisiensi |
|--------------------|----------------------|
| 100% ke atas | Tidak Efisien |
| 90% - 99% | Kurang Efisien |
| 80% - 89% | Cukup Efisien |
| 60% - 79% | Efisien |
| Kurang dari 60% | Sangat Efisien |

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

E. Definisi Operasional Variabel

Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan undang-undang selama periode anggaran pada Pemerintah Kabupaten Pangkep.

BAB IV SEJARAH SINGKAT OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi dan Demografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Secara geografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak diantara 4°40'LS sampai 8°00'LS diantara 110°BT sampai 119°48'67"BT atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Barru.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Bone.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara.
- e. Dan Pulau Bali.

Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan adalah 12.362,29 km², terdiri dari daerah daratan seluas 898,29 km² dan daerah kelautan seluas 11.464 km². Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu 9 Kecamatan berada di wilayah daratan, 2 Kecamatan berada di wilayah pegunungan, dan 4 Kecamatan berada di wilayah kepulauan, sehingga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal dengan wilayah 3 (tiga) dimensi.

Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan data statistik tahun 2014 sebanyak 320.293 jiwa meningkat sebesar 4,40% dibanding tahun 2010 yang berjumlah 306.717 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan pada tahun 2014 sedikit lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, yakni 165.685 jiwa penduduk perempuan berbanding 154.608 jiwa penduduk laki-laki (sumber data : BSP Pangkep, 2014).

2. Deskripsi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (RPJMD) Tahun 2016-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter menuju Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri”. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya karakter dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter Sumber Daya Manusia baik di daratan maupun pulau-pulau;
- c. Mengembangkan interkoneksi dan jejaring sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis daratan dan pulau-pulau;

- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif pada ekosistem daratan dan pulau-pulau;
- e. Mewujudkan tata pemerintah yang baik pada tatanan daratan dan pulau-pulau.

B. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

1. Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipimpin oleh seorang Bupati yang membawahi 3 asisten, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 26 Dinas, 6 Badan dan 13 Kecamatan. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melibatkan semua unsur kedinasan, tetapi ada 5 Perangkat Daerah yang mempunyai tugas khusus dalam proses penyusunannya tersebut, yaitu : Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat DPRD. Dalam penelitian ini difokuskan pelaksanaannya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pengumpulan RKA Perangkat Daerah dan merangkumnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan merangkumnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, utamanya dilaksanakan pada Bidang Penyusunan Anggaran.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi seorang Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, antar lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Unit Teknis Badan; dan

- f. Pelaksanaan diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Pangkejene dan Kepulauan Nomor 81 Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris yang dibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bagian, empat orang Kepala Bidang masing-masing dibantu oleh 3 Kepala Sub Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kesemuanya memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan daerah.

- a. Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sekretaris Badan mempunyai fungsi: 1). pengordinasian sinkronisasi dan integrasi kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah; 2) pengordinasian perencanaan dan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah; 3) pengordinasian pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Perangkat Daerah dan PPKD; 4). Pengordinasian kerjasama Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan instansi terkait; 5). pembinaan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, perencanaan dan pelaporan, rumah tangga Badan; dan
6). pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Penyusunan Anggaran, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyiapkan perumusan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:
- 1). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang urusan anggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 2). Pengordinasian perencanaan anggaran urusan penanganan urusan pemerintah daerah;
 - 3). Menyiapkan bahan penyusunan RKA-PD dan RKA-PPKD bidang belanja;
 - 4). Penyusunan Peraturan Daerah tentang RAPBD dan RAPBD Perubahan;
 - 5). Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penabaran APBD dan Penjabaran APBD Perubahan;
 - 6). Penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan otorisasi DPA-PD;
 - 7). Penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah;
 - 8). Penyiapan anggaran kas dan SPD PD dan PPKD;
 - 9). Penyusunan pedoman penetapan dan evaluasi APBD

desa; 10) Pelaksanaan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan perencanaan anggaran belanja; 11). Penyusunan pedoman kebijakan pembiayaan dan investasi daerah; 12). Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Penyusunan anggaran terdiri dari:

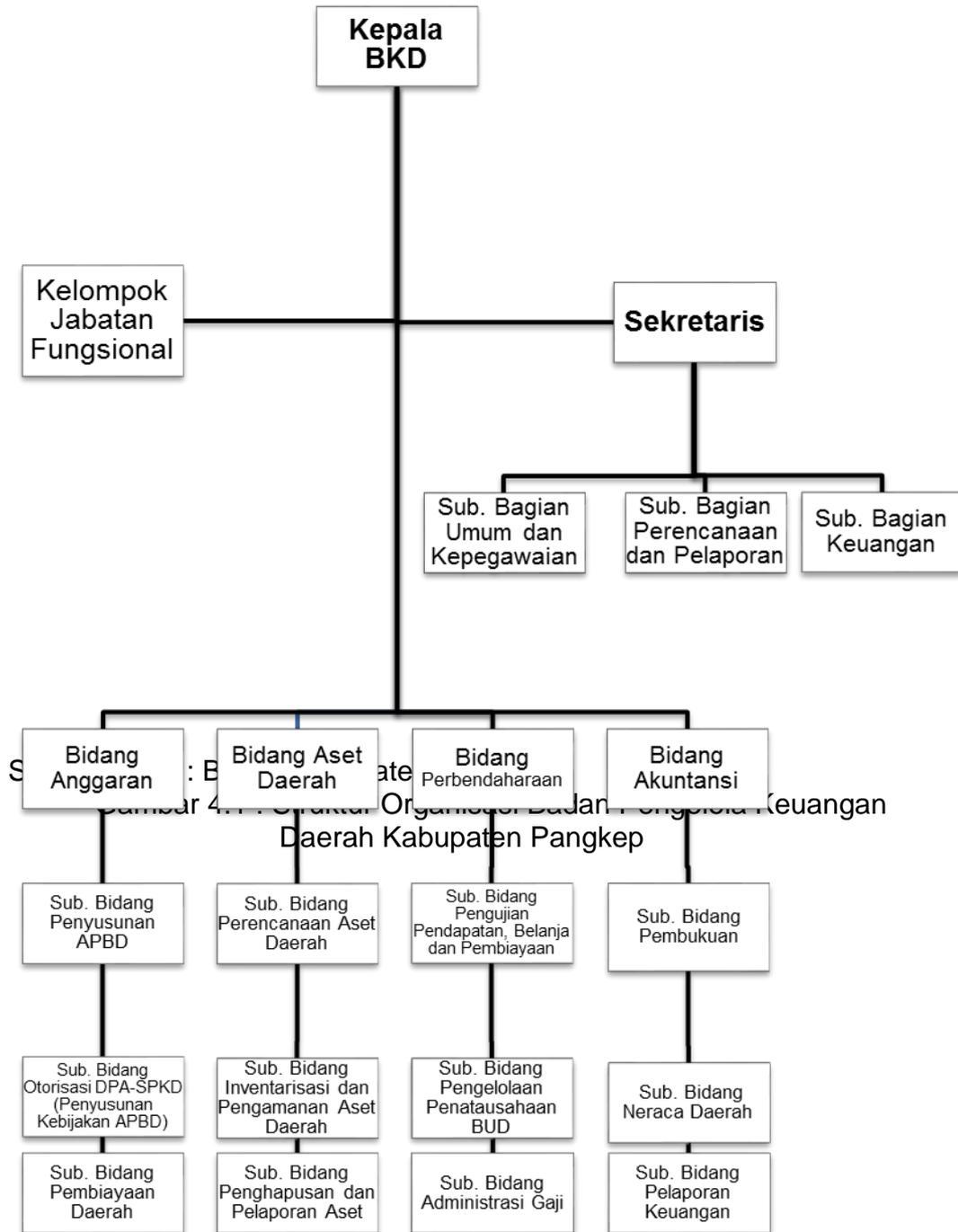
- a) Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - b) Sub Bidang Otorisasi DPA-SKPD (Penyusunan kebijakan APBD);
 - c) Sub Bidang Pembiayaan Daerah.
- c. Bidang Aset Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan aset daerah, melaksanakan kebijakan, menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan analisa, menginventarisir dan mendata seluruh aset daerah, serta melaksanakan evaluasi di bidang aset daerah. Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi :
- 1) Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan di bidang urusan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyelenggaraan penetapan kebutuhan dan pengembangan aset daerah;
 - 3) Perencanaan kebutuhan dan pengadaan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Pengordinasian dan fasilitas pengadaan aset ;
 - 5) Pembinaan, pengawasan, monitoring terhadap Aset Daerah;
 - 6) Pelaksanaan analisa, penilaian dan perhitungan biaya dalam rangka penyusunan

neraca, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah; 7) Pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan informasi Aaset Daerah; dan 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Aset Daerah terdiri dari:

- a) Sub Bidang Peerencanaan Aset Daerah;
 - b) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah.
 - c) Sub Bidang Penghapusan dan Pelaporan Aset Daerah.
- d. Bidang Pembendaharaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan bahan pedoman pengelolaan pembendaharaan daerah serta meneliti dan melakukan pengujian terhadap SPP dan SPM yang diajukan oleh perangkat Daerah. Kepala Bidang Pembendaharaan mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan pembendaharaan;
 - 2) Pelaksanaan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan pengajuan SPP dan SPM;
 - 3) Pengelolaan penerbitan SP2D;
 - 4) Pelaksanaan pengelola gaji;
 - 5) Pelaksanaan penatausahaan BUD;
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan investasi daerah;
 - 7) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bendahara pengeluaran; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Pembendaharaan terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pengujian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- b) Sub Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan BUD
 - c) Sub Bidang Adminstrasi Gaji.
- e. Bidang Akutansi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah, melaksanakan akutansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala Bidang Akutansi mempunyai fungsi :
- 1) penyiapan bahan perumusan pedoman pertanggungjawaban APBD;
 - 2) penyusunan laporan keuangan daerah; 3) penyajian informasi keuangan daerah; 4) penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 5) pelaksanaan sistem Akutansi Pemerintah Daerah; 6) meliputi laporan fungsional PD dan PPKD; 7) melakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan aset daerah; 8) pelaksanaan bimbingan, supervisi, konsultasi, dan evaluasi bidang pengelolaan akutansi dan pelaporan keuangan; dan 9) pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan Bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Akutansi terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pembukuan;
 - b) Sub Bidang Neraca Daerah;
 - c) Sub Bidang Pelaporan Keuangan

C. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Khusus

a. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2017

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut akan disajikan data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten pangkep tahun 2013 sampai dengan 2017:

Tabel 5.1. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2015

| No | Uraian | Tahun | | |
|----------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| A | Pendapatan | 913.802.938.297,92 | 1.051.222.614.469,00 | 1.255.323.437.265,89 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 101.772.643.332,81 | 118.379.394.227,00 | 141.090.708.797,89 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 792.743.398.504,11 | 914.715.202.722,00 | 1.076.464.462.948,00 |
| 3 | Pendapatan Lain yang Sah | 19.223.577.521,00 | 18.128.017.520,00 | 37.768.265.520,00 |
| B | Belanja | 862.387.709.763,89 | 1.310.852.339.449,39 | 1.292.741.566.263,50 |
| 1 | Belanja Operasi | 640.082.622.382,89 | 979.637.610.784,89 | 851.697.819.522,41 |
| 2 | Belanja Modal | 208.219.868.787,00 | 327.055.917.664,50 | 440.043.746.741,09 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 1.362.330.240,00 | 4.158.811.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 4 | Transfer | 12.722.888.354,00 | 16.567.022.585,00 | 36.686.976.585,00 |
| | Sulus/Defisit | 912.927.827.699.802,00 | 276.196.747.565,39 | 74.105.105.582,61 |

Sumber Data: BPKD Kabupaten Pangkep

Tabel 5.2. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2017

| No | Uraian | Tahun | |
|----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2016 | 2017 |
| A | Pendapatan | 1.483.575.635.906,00 | 1.380.831.545.356,39 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 162.043.747.290,00 | 219.291.126.143,57 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.302.361.900.616,00 | 1.143.241.520.913,82 |
| 3 | Pendapatan Lain yang Sah | 19.169.988.000,00 | 18.298.898.299,00 |
| B | Belanja | 1.475.930.071.155,74 | 1.300.569.060.047,04 |
| 1 | Belanja Operasi | 875.927.379.996,55 | 900.367.645.540,87 |
| 2 | Belanja Modal | 598.906.800.159,19 | 399.288.519.748,17 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 1.095.891.000,00 | 912.894.758,00 |
| 4 | Transfer | 61.714.787.585,00 | 128.980.497.100,00 |
| | Sulus/Defisit | 54.069.222.834,74 | 48.718.011.790,65 |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep

b. Realisasi APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2017

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan pelaksanaan dari perencanaan keuangan pemerintah daerah untuk pembangunan otonomi daerah. Berikut data realisasi APBD Kabupaten Pangkep tahun 2013 sampai dengan 2017:

Tabel 5.3. Realisasi APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2015

| No | Uraian | Tahun | | |
|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| A | Pendapatan | 913.802.938.297,92 | 1.025.589.186.074,30 | 1.241.169.936.814,13 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 101.835.962.272,81 | 129.209.748.612,26 | 143.977.666.333,87 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 792.743.398.504,11 | 880.220.670.109,54 | 1.063.011.390.589,09 |
| 3 | Pendapata Lain yang Sah | 19.223.577.521,00 | 16.158.767.352,50 | 34.180.879.891,17 |
| B | Belanja | 862.387.709.763,89 | 1.061.253.707.844,02 | 1.194.124.267.190,09 |
| 1 | Belanja Operasi | 640.082.622.382,89 | 739.020.921.347,02 | 788.693.161.996,80 |
| 2 | Belanja Modal | 208.219.868.787,00 | 305.729.437.914,00 | 404.953.048.450,00 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 1.362.330.240,00 | 265.500.000,00 | 478.056.743,29 |
| 4 | Transfer | 12.722.888.354,00 | 16.237.848.583,00 | 36.632.855.575,00 |
| | Sulus/Defisit | 912.927.827.699.802,00 | 35.664.521.769,72 | 10.412.814.049,04 |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep

Tabel 5.4. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2017

| No | Uraian | Tahun | |
|----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2016 | 2017 |
| A | Pendapatan | 1.400.762.724.893,77 | 1.359.084.464.942,54 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 156.226.631.623,17 | 162.773.899.914,54 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.225.093.851.961,60 | 1.132.735.214.566,00 |
| 3 | Pendapatan Lain yang Sah | 19.442.241.309,00 | 63.575.350.462,00 |
| B | Belanja | 1.340.285.292.398,61 | 1.210.206.836.907,65 |
| 1 | Belanja Operasi | 849.136.188.377,61 | 857.325.392.117,65 |
| 2 | Belanja Modal | 490.626.623.021,00 | 352.881.444.790,00 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 522.481.000,00 | 0,00 |
| 4 | Transfer | 61.197.375.535,20 | 128.608.421.500,00 |
| | Sulus/Defisit | 719.943.040,04 | 20.269.206.534,89 |

Sumber Data: BPKD Kabupaten Pangkep

Selanjutnya Ringkasan Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Lampiran halaman 65 sampai halaman 72.

2. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKD Kabupaten Pangkep dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2013-2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKD Kabupaten Pangkep pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangkep yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangkep. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Pangkep. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
 PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
 TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel 5.5. di bawah ini :

Tabel 5.5. Penghitungan Rasio DDF BPKD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017

| Tahun Anggaran | PAD (Rp) | TPD (Rp) | DDF (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------|--------------------|----------------------|---------|--------------------|
| 2013 | 101.835.962.272,81 | 913.802.938.297,92 | 11,14 | Kurang |
| 2014 | 129.209.748.612,26 | 1.025.589.186.074,30 | 12,60 | Kurang |
| 2015 | 143.977.666.333,87 | 1.241.169.936.814,13 | 11,60 | Kurang |
| 2016 | 156.226.631.623,17 | 1.400.762.724.893,77 | 11,15 | Kurang |
| 2017 | 162.773.899.914,54 | 1.359.084.464.942,54 | 11,98 | Kurang |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.5. di atas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang. Dimulai pada tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKD Kabupaten Pangkep sebesar 11,14%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 12.60%, tahun berikutnya terjadi lagi penurunan menjadi 11,60%. Terjadi penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi 11,15%, namun terjadi kenaikan di tahun 2017 menjadi 11,98%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir, namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan BPKD Kabupaten Pangkep masih kurang, karena masih berada dalam skala interval 10,01% - 20,00%.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.6 di bawah ini :

Tabel 5.6. Penghitungan Rasio KKD BPKD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017

| Tahun Anggaran | PAD (Rp) | Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (Rp) | RKKD (%) | Pola Hubungan |
|----------------|--------------------|--|----------|---------------|
| 2013 | 101.835.962.272,81 | 792.743.398.504,11 | 12,85 | Instruktif |
| 2014 | 129.209.748.612,26 | 880.220.670.109,54 | 14,68 | Instruktif |
| 2015 | 143.977.666.333,87 | 1.063.011.390.589,09 | 13,54 | Instruktif |
| 2016 | 156.226.631.623,17 | 1.225.093.851.961,60 | 12,75 | Instruktif |
| 2017 | 162.773.899.914.54 | 1.132.735.214.566,00 | 14,37 | Instruktif |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 5.6. di atas, kemampuan keuangan BPKD Kabupaten Pangkep tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 12,75% dan

nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 14,68%. Sedangkan tahun-tahun lainnya yaitu tahun 2013, 2015, dan 2017 masing-masing sebesar : 12,85%, 13,54%, dan 14,37%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi karena masih berada pada rentang antara 0% – 25%.

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 5.7. di bawah ini :

Tabel 5.7. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD BPKD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017

| Tahun Anggaran | Anggaran PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | REPAD (%) | Kriteria |
|----------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 2013 | 101.772.643.332,81 | 101.835.962.272,81 | 100,06 | Efektifitas Berimbang |
| 2014 | 118.379.394.227,00 | 129.209.748.612,26 | 109,15 | Efektif |
| 2015 | 141.090.708.797,89 | 143.977.666.333,87 | 102,05 | Efektif |
| 2016 | 162.043.747.290,00 | 156.226.631.623,17 | 96,41 | Tidak Efektif |
| 2017 | 219.291.126.143,57 | 162.773.899.914,54 | 74,23 | Tidak Efektif |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.7. di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep pada tahun 2016 dan 2017 Tidak Efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 96,41% dan 74,23%. Untuk tahun 2013 efektifitas berada pada kriteria Efektivitas Berimbang, sedangkan 2014 dan 2015 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 109,15%. dan 102,05%.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.8 di bawah ini :

Tabel 5.8. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) | REKD (%) | Kriteria |
|----------------|------------------------|---------------------------|----------|----------------|
| 2013 | 862.387.709.763,89 | 913.802.938.297,92 | 94,37 | Kurang Efisien |
| 2014 | 1.061.253.707.844,02 | 1.025.589.186.074,30 | 103,48 | Tidak Efisien |
| 2015 | 1.194.124.267.190,09 | 1.241.169.936.814,13 | 96,21 | Kurang Efisien |
| 2016 | 1.340.285.292.398,61 | 1.400.762.724.893,77 | 95,68 | Kurang Efisien |
| 2017 | 1.210.206.836.907,65 | 1.359.084.464.942,54 | 89,00 | Cukup Efisien |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.8. di atas, Efisiensi Keuangan Daerah BPKD Kabupaten Pangkep pada tahun 2017 tergolong Cukup Efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Tahun 2014 tergolong Tidak Efisien karena nilai rasionya sudah di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2013, 2015, dan 2016 efisiensinya tergolong Kurang Efisien yaitu sebesar 94,37%, 96,21% dan 95,68%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

B. Pembahasan

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Pada Tabel 5.5. menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Pangkep dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Pangkep sebesar Rp 101.835.962.272,81 atau sebesar 11,14% dari total pendapatan, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp 129.209.748.612,26 atau sebesar 12,60% dari total pendapatan. Pada tahun 2015 PAD Kabupaten Pangkep naik lagi menjadi Rp 143.977.666.333,87 atau sebesar 11,60% dari total pendapatan. Pada tahun 2016 dan 2017 pun mengalami kenaikan secara beruntun yaitu dari Rp 156.226.631.623,17 atau sebesar 11,15% menjadi Rp 162.773.899.914,54 atau 11,98% dari total pendapatan.

Total pendapatan daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2013 sampai dengan 2017 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2013 total pendapatan daerah sebesar Rp 913.802.938.297,92, mengalami kenaikan sebesar 12,23% atau menjadi Rp 1.025.589.186.074,30 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 total pendapatan daerah sebesar Rp 1.241.169.936.814,13 naik 21,02% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2016 naik sebesar 12,86% atau menjadi Rp 1.400.762.724.893,77. Pada tahun 2017, TPD mengalami penurunan sebesar 2,98% atau menjadi Rp 1.359.084.464.942,54.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.5., dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang. Dimulai pada tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKD Kabupaten Pangkep sebesar 11,14%, naik menjadi 12,60% pada tahun 2014. Tahun 2015 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKD Kabupaten Pangkep sebesar 11,60%. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,15%, dan diikuti kenaikan di tahun 2017 menjadi 11,98%. Meskipun mengalami kenaikan secara fluktuatif, namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan BPKD Kabupaten Pangkep masih Kurang, karena masih berada dalam skala interval 10,01%-20,00%.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 5.5., dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun

pada Pemerintah Kabupaten Pangkep masih Kurang karena masih berada dalam skala interval 10,01% - 20,00% dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Pangkep masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Pangkep. Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Untuk karena itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Pangkep diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri (2017) di Pekanbaru dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Pekanbaru tahun 2000-2014 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Kurang karena rata-rata rasionya sebesar 12,30%. Hal tersebut kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pangkep dimana rata-rata kinerja keuangannya sebesar 11,69% dan tergolong Kurang, meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan tahun penelitiannya. Menurut Eka Putri permasalahan yang terjadi di Pemerintah Pekanbaru adalah ketidakmampuan pemerintah

daerah yang bersangkutan untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bantuan ataupun pinjaman dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi di Kabupaten Pangkep dimana peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong Kurang.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Seperti telah diketahui pada table 5.5. sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan rata-rata 11,69% atau rata-rata Rp138,804,781,751.33 per tahun. Selanjutnya pada table 5.6. memaparkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang juga bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.6. menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sebesar Rp 792.743.398.504,11, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan 11,03% atau sebesar Rp 880.220.670.109,54. Pada tahun 2015 sebesar Rp 1.063.011.390.589,09 atau naik 20,77% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar 15,25% atau menjadi Rp 1.225.093.851.961,60 pada tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017,

bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar 7,54% atau menjadi Rp 1.132.735.214.566,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Disamping itu juga diturunkannya dana perimbangan dari provinsi berbentuk bantuan keuangan pada tahun 2016 dan 2017, walaupun dana tersebut ditahun 2017 tidak sebesar di tahun 2016 dengan selisih dana sebesar Rp 3,700,487,862.00.

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 5.6. kemampuan keuangan BPKD Kabupaten Pangkep tergolong masih rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Berawal pada tahun 2013 Rasio Kemandirian sebesar 12,85%, kemudian naik menjadi 14,68% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Rasio Kemandirian mengalami penurunan sebesar 13,54%, kemudian turun lagi pada tahun 2016 sebesar 12,75%. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi kenaikan rasio menjadi 14,37%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten

Pangkep memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori kemampuan keuangan Kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pangkep dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep secara keseluruhan dapat dikatakan rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Pangkep sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya

meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Randria Ramadhani (2016) Kinerja Keuangan Daerah Kota Tarakan pada tahun 2010-2015 jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instrukturif. Rata-rata rasionya sebesar 1,59%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Pangkep pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya sebesar 13,64% dan Kinerja Keuangannya tergolong Instrukturif. Walaupun Kabupaten Pangkep masih lebih baik rata-rata rasionya, namun masih tetap pada golongan kategori yang sama. Menurut Sri Widada (2012), penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.

3. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada table 5.7. menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Pangkep selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PAD dianggarkan sebesar Rp 101.772.643.332,81 dan dinaikkan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 118.379.394.227,00 atau 16,32% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2015, PAD dianggarkan sebesar Rp 141.090.708.797,89 atau 19,19% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2016 anggaran PAD dinaikkan menjadi Rp 162.043.747.290,00 atau 14,85% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2017 anggaran PAD kembali naik

menjadi Rp 219.291.126.143,57 atau 35,33% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten Pangkep dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, Realisasi PAD Kabupaten Pangkep sebesar Rp 101.835.962.272,81 mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp 129.209.748.612,26 atau sebesar 26,88% dari total realisasi pendapatan. Pada tahun 2015, realisasi PAD Kabupaten Pangkep meningkat lagi menjadi Rp 143.977.666.333,87 atau sebesar 11,43% dari total realisasi pendapatan. Pada tahun 2016, peningkatan terjadi lagi menjadi sebesar Rp 156.226.631.623,17 atau sebesar 8,51% dari total realisasi pendapatan. Kemudian pada tahun 2017, kenaikan mencapai Rp 162.773.899.914,54 atau 4,19% dari total realisasi pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.7. dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep pada tahun 2013 sebesar 100,06%, tahun 2014 naik sebesar 109,15%, tahun 2015 turun sebesar 102,05%, tahun 2016 turun lagi sebesar 96,41%, dan tahun 2017 turun secara beruntun menjadi sebesar 74,23%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Pangkep untuk tahun 2016 dan 2017 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2013 efektifitas berada pada kriteria Efektivitas Berimbang, sedangkan 2014 dan 2015 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 5.7., Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Pangkep dalam lima tahun terakhir sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pangkep juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan realisasi PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial, sector ekonomi potensial lainnya di bidang pendidikan, kesehatan, industri kreatif hingga perdagangan. Jika dapat maksimal, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Pemerintah Kabupaten Pangkep harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pembiayaan dan PAD.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti *et al.* (2017) yang melakukan penelitian di Salatiga dijelaskan bahwa kinerja keuangan Salatiga jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif karena berada dikisaran 118,66%. Begitupun juga dalam penelitian ini, dimana kinerja keuangan Kabupaten Pangkep sudah efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.8., diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2013 sampai dengan 2017 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2017 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2013 belanja daerah Kabupaten Pangkep sebesar Rp 862.387.709.763,89, naik menjadi Rp 1.061.253.707.844,02 pada tahun 2014. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 menjadi Rp 1.194.124.267.190,09. Dan pada tahun 2016, peningkatan signifikan pada realisasi belanja sebesar Rp 1.340.285.292.398,61, kemudian terjadi penurunan belanja daerah menjadi Rp 1.210.206.836.907,65 pada tahun 2017.

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2013 sampai dengan 2017 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Berawal dari tahun 2013 total pendapatan daerah sebesar Rp 913.802.938.297,92. Mengalami kenaikan sebesar 12,23% atau menjadi Rp 1.025.589.186.074,30 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 total

realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.241.169.936.814,13 naik 21,02% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2016 naik sebesar 12,86 % atau menjadi Rp 1.400.762.724.893,77. Kemudian, pada tahun 2017 juga realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 2,98% atau menjadi Rp 1.359.084.464.942,54.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.8 juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 95,75% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Pada tahun 2013 rasio efisiensinya sebesar 94,37%, kemudian tahun 2014 menjadi 103,48%, tahun 2015 sebesar 96,21%, tahun 2016 sebesar 95,68%, dan tahun 2017 sebesar 89,00%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep yang tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 95,75% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2014. Pada tahun 2017, Pemerintah Pangkep sudah mulai mampu menekan jumlah belanja daerahnya hingga Rasio Efisiensinya berada pada taraf Cukup Efisien. Meskipun begitu, dalam empat tahun akhir sebelumnya, kecuali di tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pangkep sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal ini masih kurang baik karena belum dapat menekan

jumlah belanja daerahnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Melisa Anastasia. B (2012) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Kinerja keuangannya jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien karena rata-ratanya sebesar 87,34%. Menurut peneliti, hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah berhasil menerapkan efisiensi anggarannya. Hal senada juga di katakan oleh Sunanto (2017) yang dalam penelitiannya di Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa Kinerja APBD DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin atas penerimaan PAD dalam kurun waktu 2013-2015 sudah Efisien karena berada pada kisaran rasio rata-rata 9,97%. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam penelitian ini dimana rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep sejak 2013 hingga 2016 berkriteria Tidak Efisien.

Berkaca pada kategori Cukup Efisien dengan kisaran Rasio Efisiensi Keuangan sebesar 89,00% di tahun 2017, untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Pangkep dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

C. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang, karena berada dalam skala interval. Jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih Sangat Rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval. Sedangkan Efektivitas Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep pada tahun 2016 dan 2017 Tidak Efektif, selanjutnya dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2017 tergolong Cukup Efisien.

D. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah

harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga, penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitriyah. 2007. "*Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)*". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ana, Dwi Kurniawati. 2004. "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo (Perbandingan Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)*". Skripsi Fakultas Ekonomi. UNS Surakarta.
- Basir, Andi Melisa Anastasia. 2012. "*Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep*". Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Unhas. Diakses pada tanggal 13 Juli 2018.
- Halim, Abdul. 2007. "*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*". Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul. 2010. "*Pengelolaan Keuangan Daerah*". Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hariati, Eka Putri. 2017. "*Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru*". Jurnal JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. Diakses tanggal 12 Juli 2018.
- Mardiasmo. 2002. "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- 2006. "*Akuntansi Sektor Publik*". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahsun, Muhammad. 2009. "*Pengukuran Kinerja Sektor Publik*". Yogyakarta : BPFE.
- Mujiwardhani, Alfian. 2008. "*Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah)*". Skripsi Fakultas Ekonomi, UNS Surakarta. Diakses pada tanggal 13 Juli 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Randria Ramadhani, Febby. 2016. "*Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015*". Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.01 Juni 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses pada tanggal 13 Juli 2018.
- Sijabat, Mentari Yosephen, Choirul Shaleh & Abdul Wachid. 2013. "*Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan*

- Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.*” Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 2, Hal. 236-242.
- Sumarjo,Hendro. 2010. “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Sunanto. 2017. “*Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Musi Banyuasin.*” Jurnal MONEX Vol.6 No 1 Januari 2017 ISSN:2089-5321. Diakses pada tanggal 13 Juli 2018.
- Susanti, Elly., Raharjo, Kharis., Abrar, Oemar. 2017. “*Analisis Rasio Laporan Keuangan Apbd (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016.*” Jurnal Ekonomi-Akuntansi 2017. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang. Diakses pada tanggal 13 Juli 2018.
- Syamsi,Ibnu. 1986. “*Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional.*” Jakarta: CV Rajawali.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan kemandirian BPK.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widada, Sri. 2012. “*Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.*” Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widodo, 2001. “*Analisa Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah.*” Yogyakarta: UPP YKPN.

Lampiran 1. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2013-2014



Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan TA 2014
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

| KODE REKENING | URAIAN | REF | REALISASI TA 2013 | ANGGARAN PERUBAHAN 2014 | REALISASI TA 2014 | % |
|---------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | PENDAPATAN | B.1 | 913.802.938.297,92 | 1.051.222.614.469,00 | 1.025.589.186.074,30 | 97,56% |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | B.1.1 | 101.835.962.272,81 | 118.379.394.227,00 | 129.209.748.612,26 | 109,15% |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | B.1.1.1 | 65.498.191.800,00 | 66.109.499.195,00 | 71.703.863.292,84 | 108,46% |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | B.1.1.2 | 19.947.012.385,65 | 35.522.686.778,00 | 36.256.450.033,07 | 102,07% |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | B.1.1.3 | 7.530.925.842,00 | 8.836.506.354,00 | 8.740.986.292,00 | 98,92% |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | B.1.1.4 | 8.859.832.237,16 | 7.910.701.900,00 | 12.508.448.994,35 | 158,12% |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | B.1.2 | 792.743.398.504,11 | 914.715.202.722,00 | 880.220.670.109,54 | 96,23% |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | B.1.2.1 | 680.680.811.635,00 | 735.493.267.558,00 | 724.605.579.018,00 | 98,52% |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | B.1.2.1.1 | 34.089.344.505,00 | 36.434.076.611,00 | 25.534.886.201,00 | 70,09% |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | B.1.2.1.2 | 1.460.990.130,00 | 3.092.710.947,00 | 3.104.212.817,00 | 100,37% |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | B.1.2.1.3 | 566.929.217.000,00 | 623.418.990.000,00 | 623.418.990.000,00 | 100,00% |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | B.1.2.1.4 | 78.201.060.000,00 | 72.547.490.000,00 | 72.547.490.000,00 | 100,00% |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | B.1.2.2 | 85.365.439.000,00 | 147.417.047.000,00 | 119.568.900.000,00 | 81,11% |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | B.1.2.2.2 | 85.365.439.000,00 | 147.417.047.000,00 | 119.568.900.000,00 | 81,11% |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | B.1.2.3 | 26.697.347.869,11 | 31.804.888.164,00 | 36.046.191.091,54 | 113,34% |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | B.1.2.3.1 | 26.697.347.869,11 | 31.804.888.164,00 | 36.046.191.091,54 | 113,34% |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | B.1.3 | 19.223.577.521,00 | 18.128.017.520,00 | 16.158.767.352,50 | 89,14% |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | B.1.3.1 | 1.404.934.001,00 | 1.402.060.000,00 | 630.702.200,00 | 44,98% |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | B.1.3.2 | 17.818.643.520,00 | 16.725.957.520,00 | 15.528.065.152,50 | 92,84% |
| 2 | BELANJA | B.2 | 862.387.709.763,89 | 1.145.419.362.034,39 | 1.061.253.707.844,02 | 92,66% |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | B.2.1 | 640.082.622.382,89 | 979.637.610.784,89 | 739.020.921.347,02 | 92,66% |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | B.2.1.1 | 506.504.677.516,00 | 585.139.355.223,64 | 549.229.307.271,00 | 93,86% |
| 2.1.2 | Belanja Barang | B.2.1.2 | 104.409.633.229,00 | 155.254.133.768,25 | 134.778.122.829,31 | 87,50% |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | B.2.1.3 | 26.844.108,89 | 20.000.000,00 | 16.778.555,71 | 83,89% |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | B.2.1.5 | 26.979.871.529,00 | 53.387.160.793,00 | 51.756.690.191,00 | 96,65% |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | B.2.1.6 | 2.161.596.000,00 | 3.836.581.000,00 | 3.240.022.500,00 | 84,45% |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | B.2.1.7 | 0 | 380.000,00 | 0 | 0,00% |
| 2.2 | BELANJA MODAL | B.2.2 | 208.219.868.767,00 | 327.055.917.664,50 | 305.729.437.914,00 | 93,48% |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | B.2.2.1 | 1.580.509.080,00 | 2.220.825.052,00 | 897.809.000,00 | 40,43% |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | B.2.2.2 | 29.974.748.894,00 | 56.147.004.075,50 | 54.336.732.965,00 | 96,78% |



Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan TA 2014

LAPORAN KEUANGAN

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | B.2.2.3 | 74.980.458.303,00 | 108.735.208.756,00 | 97.889.191.220,00 | 90,03% |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | B.2.2.4 | 100.698.820.010,00 | 152.264.936.331,00 | 149.373.736.229,00 | 98,10% |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | B.2.2.5 | 985.332.500,00 | 7.687.943.450,00 | 3.231.968.500,00 | 42,04% |
| 2.3 | BELANJA TAK TERDUGA | B.2.3 | 1.362.330.240,00 | 4.158.811.000,00 | 265.500.000,00 | 6,38% |
| | Belanja Tak Terduga | B.2.3 | 1.362.330.240,00 | 4.158.811.000,00 | 265.500.000,00 | 6,38% |
| 2.4 | TRANSFER | B.3 | 12.722.888.354,00 | 16.567.022.585,00 | 16.237.848.583,00 | 98,01% |
| 2.4.1 | Transfer Bagi Hasil Ke KABKOTA/DESA | B.3.1 | 12.722.888.354,00 | 16.567.022.585,00 | 16.237.848.583,00 | 98,01% |
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | B.3.1.1 | 345.312.500,00 | 16.567.022.585,00 | 347.685.000,00 | 2,10% |
| 2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | B.3.1.1 | 12.377.575.854,00 | 0 | 15.890.163.583,00 | 100,00% |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | | 51.415.228.534,03 | -94.196.747.565,39 | -35.664.521.769,72 | 37,86% |
| 3 | PEMBIAYAAN | B.4 | | 0 | 0 | 100,00% |
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH | B.4.1 | 42.929.983.674,63 | 94.276.747.565,39 | 94.276.549.985,39 | 100,00% |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | B.4.1.1 | 42.929.983.674,63 | 94.276.747.565,39 | 94.276.549.985,39 | 100,00% |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | B.4.1.2 | 25.050.000,00 | 0 | 0 | 100,00% |
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH | B.4.2 | 68.464.643,27 | 80.000.000,00 | 62.538.489,99 | 78,17% |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | B.4.2.1 | 713.418,08 | 0 | 0 | 100,00% |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | B.4.2.2 | 68.464.643,27 | 80.000.000,00 | 62.538.489,99 | 78,17% |
| | PEMBIAYAAN NETTO | | 42.861.519.031,36 | 94.196.747.565,39 | 94.214.011.495,40 | 100,02% |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | | 94.276.747.565,39 | 0 | 58.549.489.725,68 | |

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Pangkajene, 31 Desember 2014
BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

H. SYAMSUDDIN A.HAMID

Lampiran 2. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2014-2015

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Ref | Jumlah Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi 2014 |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| PENDAPATAN - LRA | VA.1 | 1.255.323.437.265,89 | 1.241.188.938.814,13 | 98,87 | 1.825.585.186.874,38 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | VA.1.1 | 141.680.728.797,89 | 143.877.866.323,87 | 102,95 | 128.288.748.812,28 |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | VA.1.1.1 | 70.755.342.395,00 | 72.530.832.407,60 | 102,51 | 71.793.863.292,84 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | VA.1.1.2 | 48.434.770.220,00 | 51.457.129.255,25 | 106,23 | 36.258.450.033,07 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dialokasikan - LRA | VA.1.1.3 | 10.071.470.794,89 | 10.071.479.794,89 | 100,00 | 8.740.988.292,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah - LRA | VA.1.1.4 | 10.828.916.388,00 | 9.818.214.686,33 | 91,58 | 12.508.448.994,25 |
| PENDAPATAN TRANSFER - LRA | VA.1.2 | 1.079.484.482.948,00 | 1.083.811.393.589,89 | 100,75 | 893.233.879.109,54 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | VA.1.2.1 | 874.885.526.888,00 | 865.579.542.288,06 | 99,03 | 724.866.578.018,80 |
| Bagi Hasil Pajak - LRA | VA.1.2.1.1 | 31.820.446.300,00 | 24.194.248.900,00 | 76,00 | 25.534.886.201,30 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | VA.1.2.1.2 | 2.999.866.688,00 | 2.201.070.388,00 | 73,37 | 3.104.212.817,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | VA.1.2.1.3 | 850.132.194.000,00 | 850.132.194.000,00 | 100,00 | 823.418.990.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | VA.1.2.1.4 | 189.055.020.000,00 | 189.055.020.000,00 | 100,00 | 170.281.890.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | VA.1.2.2 | 181.963.871.000,00 | 182.872.871.900,99 | 100,91 | 118.568.998.000,00 |
| Dana Penyalangan - LRA | VA.1.2.2.1 | 181.963.871.000,00 | 182.872.871.900,00 | 100,91 | 118.568.998.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | VA.1.2.3 | 41.375.985.268,00 | 35.387.977.391,89 | 85,48 | 38.046.191.891,54 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | VA.1.2.3.1 | 41.375.985.268,00 | 35.387.977.391,89 | 85,48 | 38.046.191.891,54 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | VA.1.3 | 37.768.265.528,88 | 34.180.878.891,17 | 90,50 | 16.158.787.352,50 |
| Pendapatan Hibah - LRA | VA.1.3.1 | 1.402.060.000,00 | 897.823.900,00 | 63,96 | 830.702.200,00 |
| Pendapatan Lainnya - LRA | VA.1.3.2 | 36.366.205.528,88 | 33.282.954.991,17 | 91,50 | 15.328.085.152,50 |
| BELANJA | VA.2 | 1.282.741.588.263,58 | 1.194.134.287.180,08 | 93,07 | 1.943.815.858.281,02 |
| BELANJA OPERASI | VA.2.1 | 891.897.818.522,41 | 788.893.181.998,86 | 88,45 | 738.822.921.347,82 |
| Belanja Pegawai | VA.2.1.1 | 621.428.871.461,86 | 577.778.883.918,00 | 92,98 | 548.229.387.271,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | VA.2.1.2 | 168.647.187.629,75 | 153.661.800.554,00 | 90,58 | 134.778.122.828,31 |
| Belanja Bunga | VA.2.1.3 | 9.328.223,80 | 9.328.223,80 | 100,00 | 16.778.555,71 |
| Belanja Hibah | VA.2.1.4 | 58.271.232.267,00 | 55.004.049.200,00 | 94,43 | 51.756.890.191,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | VA.2.1.5 | 2.340.100.000,00 | 2.219.100.000,00 | 94,83 | 3.240.022.500,00 |
| BELANJA MODAL | VA.2.2 | 449.843.748.741,89 | 404.953.048.450,00 | 90,03 | 395.728.427.814,00 |
| Belanja Modal Tanah | VA.2.2.1 | 6.977.830.052,00 | 6.847.454.000,00 | 98,13 | 897.809.000,00 |
| Belanja Modal Perawatan dan Mesin | VA.2.2.2 | 60.193.839.502,00 | 54.176.049.894,00 | 90,00 | 54.338.732.965,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | VA.2.2.3 | 122.256.877.744,00 | 104.579.006.808,00 | 85,54 | 87.888.191.220,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | VA.2.2.4 | 244.878.218.488,00 | 234.390.965.167,00 | 95,72 | 149.573.736.229,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | VA.2.2.5 | 5.737.183.897,89 | 4.958.532.500,00 | 86,45 | 3.221.068.500,00 |
| BELANJA TAK TERDUGA | | 1.990.899.999,00 | 478.058.743,29 | 23,99 | 285.588.888,00 |
| Belanja Tak Terduga | VA.2.3 | 1.000.000.000,00 | 478.058.743,29 | 47,81 | 265.500.000,00 |
| TRANSFER | VA.3 | 36.686.976.585,00 | 38.832.855.675,00 | 105,85 | 18.237.848.583,90 |
| TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | VA.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.885.900,00 |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.885.900,00 |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Uraian | Ref | Jumlah Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi 2014 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|---------|---------------------|
| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | V.A.3.2 | 36.606.376.585,00 | 36.632.855.575,00 | 99,85 | 15.890.163.583,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | V.A.3.2.1 | 35.898.585.585,00 | 35.844.465.575,00 | 99,85 | 15.890.163.583,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | V.A.3.2.2 | 788.391.000,00 | 788.390.000,00 | 100,00 | - |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (74.105.195.582,81) | 10.412.814.049,04 | (14,05) | (38.664.521.769,72) |
| PEMBIAYAAN | V.A.4 | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | V.A.4.1 | 75.767.844.072,58 | 58.548.835.275,68 | 77,27 | 84.278.549.885,39 |
| Panggunaan SILPA | V.A.4.1.1 | 58.548.489.725,68 | 58.548.835.275,68 | 100,00 | 84.278.549.885,39 |
| Penerimaan Kembali Piutang | V.A.4.1.2 | 17.219.154.346,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | V.A.4.2 | 1.662.538.489,98 | 1.062.538.489,98 | 63,91 | 62.538.489,99 |
| Penyetaraan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | V.A.4.2.1 | 1.600.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 62,50 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | V.A.4.2.2 | 62.538.489,98 | 62.538.489,98 | 100,00 | 62.538.489,99 |
| PEMBIAYAAN NETTO | | 74.105.195.582,81 | 57.486.396.785,70 | 77,57 | 84.214.011.485,40 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | V.A.5 | 0,00 | 67.869.219.834,74 | | 58.548.489.725,68 |

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama Ini

Pangkajene, 23 Mei 2016
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE

Lampiran 3. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2015-2016


Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2016

Laporan Keuangan Pokok (Setelah Audit)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

| No | URAIAN | ANGGARAN 2016 | REALISASI 2016 | % | REALISASI 2015 (AUDITED) |
|----|--|----------------------|----------------------|------|--------------------------|
| 1 | PENDAPATAN – LRA | 1.483.575.835.906,00 | 1.400.762.724.893,77 | 94% | 1.241.169.936.814,13 |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 162.043.747.290,00 | 156.226.631.623,17 | 96% | 143.977.666.333,87 |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 72.135.110.395,00 | 75.565.057.992,00 | 105% | 72.530.832.497,80 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 48.745.001.975,00 | 44.441.430.495,00 | 91% | 51.457.139.355,35 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 11.224.012.491,00 | 10.916.672.337,00 | 97% | 10.071.479.794,89 |
| 6 | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 29.939.622.429,00 | 25.303.470.799,17 | 85% | 9.918.214.686,03 |
| 7 | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 1.302.361.900.616,00 | 1.225.093.851.961,60 | 94% | 1.063.011.390.589,09 |
| 8 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 1.191.000.079.616,00 | 1.114.262.819.971,00 | 94% | 865.570.542.288,00 |
| 9 | Bagi Hasil Pajak - LRA | 30.109.851.678,00 | 23.187.965.472,00 | 77% | 24.184.248.900,00 |
| 10 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 7.354.548.168,00 | 7.796.322.878,00 | 106% | 2.201.079.388,00 |
| 11 | Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 878.221.231.874,00 | 701.629.223.000,00 | 104% | 680.132.194.000,00 |
| 12 | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 477.314.448.000,00 | 381.679.306.621,00 | 80% | 189.053.020.000,00 |
| 13 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 49.893.759.900,00 | 49.893.759.000,00 | 100% | 162.072.871.000,00 |
| 14 | Dana Penyesuaian - LRA | 49.093.759.000,00 | 49.093.759.000,00 | 100% | 162.072.871.000,00 |
| 15 | Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA | 40.465.065.260,00 | 47.149.673.928,60 | 117% | 35.367.977.301,09 |
| 16 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 40.465.065.260,00 | 47.149.673.928,60 | 117% | 35.367.977.301,09 |
| 17 | Bantuan Keuangan - LRA | 21.802.996.840,00 | 14.587.599.062,00 | 67% | 0,00 |
| 18 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 21.802.996.840,00 | 14.587.599.062,00 | 67% | 0,00 |
| 19 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 19.169.988.000,00 | 19.442.241.309,00 | 101% | 897.923.900,00 |
| 20 | Pendapatan Hibah - LRA | 19.169.988.000,00 | 19.442.241.309,00 | 101% | 897.923.900,00 |
| 21 | BELANJA | 1.475.930.071.155,74 | 1.340.285.292.398,61 | 91% | 1.194.124.267.190,09 |
| 22 | BELANJA OPERASI | 875.927.379.996,55 | 849.136.188.377,61 | 97% | 788.693.161.996,80 |
| 23 | Belanja Pegawai | 586.547.087.289,55 | 581.225.075.502,00 | 99% | 577.778.883.919,00 |
| 24 | Belanja Barang dan Jasa | 255.767.986.332,00 | 235.909.506.063,00 | 92% | 153.661.800.554,00 |
| 25 | Belanja Bunga | 30.000.000,00 | 1.903.212,61 | 6% | 9.328.223,80 |
| 26 | Belanja Hibah | 31.631.396.375,00 | 30.141.003.800,00 | 96% | 55.024.049.300,00 |
| 27 | Belanja Bantuan Sosial | 1.950.900.000,00 | 1.858.700.000,00 | 95% | 2.219.100.000,00 |



Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2016

| No | URAIAN | ANGGARAN 2016 | REALISASI 2016 | % | REALISASI 2015 (AUDITED) |
|----|---|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 28 | BELANJA MODAL | 598.906.800.159,19 | 490.626.623.021,00 | 82% | 404.953.048.450,00 |
| 29 | Belanja Modal Tanah | 10.012.862.797,19 | 9.364.952.200,00 | 94% | 8.847.494.000,00 |
| 30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 92.391.507.846,00 | 52.025.918.342,00 | 56% | 54.176.049.984,00 |
| 31 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 138.291.196.924,00 | 125.344.278.391,00 | 91% | 104.579.006.809,00 |
| 32 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 355.091.348.676,00 | 301.215.211.248,00 | 85% | 234.390.985.157,00 |
| 33 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.119.883.916,00 | 2.676.262.840,00 | 86% | 4.959.532.500,00 |
| 34 | BELANJA TAK TERDUGA | 1.095.891.000,00 | 522.481.000,00 | 48% | 478.056.743,29 |
| 35 | Belanja Tak Terduga | 1.095.891.000,00 | 522.481.000,00 | 48% | 478.056.743,29 |
| 36 | TRANSFER | 61.714.787.585,00 | 61.197.375.535,20 | 99% | 36.632.855.575,00 |
| 37 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 61.714.787.585,00 | 61.197.375.535,20 | 99% | 36.632.855.575,00 |
| 38 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 60.926.396.585,00 | 60.408.984.535,20 | 99% | 35.844.465.575,00 |
| 39 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 788.391.000,00 | 788.391.000,00 | 100% | 788.390.000,00 |
| 40 | SURPLUS/(DEFISIT) | (54.069.222.834,74) | (719.943.040,04) | 1% | 10.412.814.049,04 |
| 42 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 50.242.215.818,74 | 67.899.210.834,74 | 135% | 58.548.935.275,68 |
| 43 | Penggunaan SILPA | 45.242.215.818,74 | 67.899.210.834,74 | 150% | 58.548.935.275,68 |
| 44 | Penerimaan Kembali Piutang | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 45 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 18.829.988.000,00 | 18.461.256.004,05 | 98% | 1.062.538.489,98 |
| 46 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 18.729.988.000,00 | 18.429.986.759,00 | 98% | 1.000.000.000,00 |
| 47 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 100.000.000,00 | 31.269.245,05 | 31% | 62.538.489,98 |
| 48 | PEMBIAYAAN NETTO | 31.412.227.818,74 | 49.437.954.830,69 | 157% | 57.486.396.785,70 |
| 49 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (22.656.995.016,00) | 48.718.011.790,65 | -215% | 67.899.210.834,74 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 7 Juni 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI**

H. SYAMSUDDIN A. HAMID

Lampiran 4. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2016-2017



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 | (%) | REALISASI 2016 |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 4 | PENDAPATAN - LRA | 1.380.831.545.356,39 | 1.359.084.464.942,54 | 98,43 | 1.400.762.724.893,77 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 219.291.126.143,57 | 162.773.899.914,54 | 74,23 | 148.264.992.584,36 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 73.956.757.472,53 | 72.915.174.176,00 | 98,59 | 76.454.430.498,00 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 9.130.437.361,00 | 6.722.211.814,00 | 73,62 | 43.552.058.079,00 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 11.764.745.448,35 | 11.264.745.448,35 | 95,75 | 10.916.672.337,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 124.439.185.861,69 | 71.871.768.476,19 | 57,76 | 17.341.831.760,36 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 1.143.241.520.913,82 | 1.132.735.214.566,00 | 99,08 | 1.225.093.851.961,60 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 1.016.481.354.762,00 | 1.010.789.986.729,00 | 99,44 | 1.114.262.819.971,00 |
| 4.2.1.1 | Bagi Hasil Pajak - LRA | 28.594.366.762,00 | 27.438.649.541,00 | 95,96 | 23.187.965.472,00 |
| 4.2.1.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 4.521.449.000,00 | 3.814.290.599,00 | 84,36 | 7.766.322.878,00 |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 689.947.090.000,00 | 689.947.090.000,00 | 100,00 | 701.629.223.000,00 |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 46.235.834.000,00 | 46.835.740.700,00 | 101,30 | 250.074.672.686,00 |
| 4.2.1.6 | Dana Alokasi Khusus TPO - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.399.484.414,00 |
| 4.2.1.7 | Dana Alokasi Khusus AFFIRMASI - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.319.209.000,00 |
| 4.2.1.8 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA | 128.381.651.000,00 | 125.233.053.647,00 | 97,55 | 90.381.567.521,00 |
| 4.2.1.9 | Dana Alokasi Khusus Penugasan - LRA | 63.479.106.000,00 | 63.390.300.000,00 | 99,86 | 1.554.375.000,00 |
| 4.2.1.10 | Penyelesaian DAK Fisik - LRA | 55.321.858.000,00 | 54.130.862.242,00 | 97,85 | 0,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 63.379.672.000,00 | 63.085.494.357,00 | 99,54 | 49.093.759.000,00 |
| 4.2.2.3 | Dana Penyesuaian - LRA | 63.379.672.000,00 | 63.085.494.357,00 | 99,54 | 49.093.759.000,00 |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 53.239.481.351,82 | 47.972.622.280,00 | 90,11 | 47.149.673.928,60 |
| 4.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 53.239.481.351,82 | 47.972.622.280,00 | 90,11 | 47.149.673.928,60 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan - LRA | 10.141.012.800,00 | 10.887.111.200,00 | 107,36 | 14.587.599.062,00 |
| 4.2.4.1 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 10.141.012.800,00 | 10.887.111.200,00 | 107,36 | 14.587.599.062,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 18.298.898.299,00 | 63.575.350.462,00 | 347,43 | 27.403.880.347,81 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah - LRA | 18.298.898.299,00 | 18.092.250.798,00 | 98,87 | 27.403.880.347,81 |
| 4.3.3 | Pendapatan Lainnya - LRA | 0,00 | 45.483.099.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | BELANJA | 1.300.569.060.047,04 | 1.210.206.836.907,65 | 93,05 | 1.340.343.737.110,52 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 900.367.645.540,67 | 857.325.392.117,65 | 95,22 | 849.191.731.589,52 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 512.691.820.047,22 | 495.480.818.051,00 | 96,64 | 503.597.603.288,41 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 378.066.575.493,65 | 324.239.427.106,65 | 85,76 | 233.592.521.408,50 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903.212,61 |

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 | (%) | REALISASI 2016 |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 7.728.000.000,00 | 35.730.396.960,00 | 462,35 | 30.141.003.600,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 1.880.850.000,00 | 1.874.750.000,00 | 99,68 | 1.858.700.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 399.288.519.748,17 | 352.881.444.790,00 | 88,38 | 490.629.524.521,00 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 1.659.974.800,00 | 1.523.565.000,00 | 91,78 | 9.440.942.200,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 86.987.728.867,03 | 73.366.580.090,00 | 84,34 | 51.952.829.842,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 99.673.462.010,00 | 86.178.259.015,00 | 86,46 | 125.344.278.391,00 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 196.176.620.609,14 | 177.770.562.546,00 | 90,62 | 301.215.211.248,00 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 14.790.733.462,00 | 14.042.078.139,00 | 94,94 | 2.676.262.840,00 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 912.894.758,00 | 0,00 | 0,00 | 522.481.000,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 912.894.758,00 | 0,00 | 0,00 | 522.481.000,00 |
| 6 | TRANSFER | 128.980.497.100,00 | 128.608.421.500,00 | 99,71 | 61.197.375.535,20 |
| 6.2 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 128.980.497.100,00 | 128.608.421.500,00 | 99,71 | 61.197.375.535,20 |
| 6.2.2 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 128.192.106.100,00 | 127.820.030.500,00 | 99,71 | 60.408.984.535,20 |
| 6.2.3 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 788.391.000,00 | 788.391.000,00 | 100,00 | 788.391.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (48.718.011.790,65) | 20.269.206.534,89 | (41,61) | (778.387.751,95) |
| 7 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 7.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 53.718.011.790,65 | 49.317.860.800,65 | 91,81 | 67.899.210.834,74 |
| 7.1.1 | Penggunaan SILPA | 48.718.011.790,65 | 49.317.860.800,65 | 101,23 | 67.899.210.834,74 |
| 7.1.5 | Penerimaan Kembali Piutang | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 100,00 | 18.429.986.759,00 |
| 7.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 100,00 | 18.429.986.759,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 48.718.011.790,65 | 44.317.860.800,65 | 90,97 | 49.469.224.075,74 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0,00 | 64.587.067.335,54 | 0,00 | 48.690.836.323,79 |

Pangkajene, 1 Januari 2017
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

H. SYAMSUDDIN A. HAMED, SE

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No.02 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018
e-mail : lppmummayapimmaros@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoo – Pamelakkang Jenne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maros, 25 April 2018

Nomor : 181 /LPPM-UMMA/IV/2018
Lampiran : 1 exemplar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kesbangpol Kab Pangkep
Di-
Pangkep

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,
Dalam rangka penyelesaian studi akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros (FEB-UMMA) tahun akademik 2017/2018, maka kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan rekomendasi izin penelitian kepada mahasiswa kami pada lokasi sebagaimana tercantum dalam proposal terlampir.

Adapun data diri mahasiswa tersebut, yaitu:

Nama : Wahidah
NIM : 1460302243
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Keuangan
Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Daerah
Judul Penelitian : Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pangkep

Demikian Permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ketua,


Dr. Suhartina R, S.Pd., M.Hum.
NIDN. 0914017001

Tembusan Kepada Yth.

1. Biro Administrasi Akademik UMMA
2. Dekan Feb UMMA
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018

e-mail : lppmummayapimmaros@gmail.com, Kode Pos 90511

Kampus 2 : Jalan Kokoa – Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros



TANDA TERIMA PROPOSAL PENELITIAN

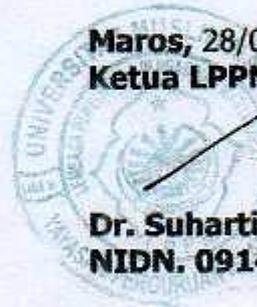
No : 006 / LPPM-UMMA / Prop / V / 2018
Nama : WAHIDAH
NIM : 1460302243
Fakultas : FEB
Prodi : 61201 Manajemen (S1)
NO. HP : 85341929777
Judul Proposal :
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKEP

**Benar telah mengirimkan Proposal ke LPPM-UMMA YAPIM Maros.
Demikian tanda terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.**

Maros, 28/05/2018 15:11:28

Ketua LPPM UMMA


Dr. Suhartina R, S.Pd.M.Hum.
NIDN. 0914017001





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. Sultan Hasanuddin Km.3 Telp. (0410) 21053 Pangkajene-Pangkep 90611

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 733/BPKD/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dra Hj. Jumliati, M.Si
Nip : 19601231 198903 2 042
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : WAHIDAH
NIM : 1460302243
Jurusan : Manajemen Keuangan
Universitas/Lembaga : Universitas Muslim Maros
Alamat : Maros

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep dengan Judul "**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pangkep**" yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei s/d 07 Mei 2018.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Pangkep, 07 Mei 2018

KEPALA BADAN,

Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19601231 198903 2 042

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kab. Pangkajene di Pangkajene (Sebagai laporan).
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Pangkajene
3. Peringgal

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No.52 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018 e-mail : umma.yapim.2015@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa – Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau kabupaten Maros



BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Juli tahun Dua ribu Delapan Belas bertempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama : Wahidah
NIM : 1960802243
Jurusan/Pogram Studi : FEB
Konsentrasi : Keuangan
Judul : Analisis kemampuan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten pangkep

Dengan Perbaikan :

1. Semua coretan / penghapusan di pentanah di
2. Orbawa serta janda soal pinda terganu pembeli
- 3.
- 4.

Berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya.

Diketahui oleh :
Dekan FEB-UMMA,

Dr. Dahlan, SE., MM

Maros, 25 Juli 2018
Penguji,

Dr. DAHLAN, SE, MM

Catatan;
Setelah selesai agar diserahkan kembali ke MAHASISWA

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018 e-mail : umma.yapim.2015@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa – Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau kabupaten Maros



BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Juli tahun Dua ribu Delapan Belas bertempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama : wahidlah
NIM : 1460302243
Jurusan/Pogram Studi : Manajemen / FEB
Konsentrasi : keuangan
Judul :

Dengan Perbaikan :

1. Perbaiki Masalah
2. Uraikanlah Angka 2 yg dala & kesimpulan, dititikan
- 3.
- 4.

Berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya.

Diketahui oleh :
Dekan FEB-UMMA,

Dr. Dahlan, SE.,MM

Maros, 25 Juli 2018
Penguji,

Dr. H. MUHAMMAD ISHLAH IDRUS, SE.,M.Si

Catatan;
Setelah selesai agar diserahkan kembali ke MAHASISWA

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018 e-mail : umma.yapim.2015@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa – Pamefakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau kabupaten Maros



BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Juli tahun Dua ribu Delapan Belas bertempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama : wahidah
NIM : 1460302243
Jurusan/Pogram Studi : Manajemen / keuangan
Konsentrasi : Keuangan
Judul : Analisis kemampuan keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten pangkep

Dengan Perbaikan :

1. revisi Pengantar

2. Bab 3.

3. Kutipan harus jelas sumbernya.

4.

Berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya.

Diketahui oleh :
Dekan FEB-UMMA,

Dr. Dahlan, SE., MM

Maros, 25 Juli 2018
Penguji,

NURWAHIDAH, SE., M.Si

Catatan;
Setelah selesai agar diserahkan kembali ke **MAHASISWA**

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018 e-mail : umma.yapim.2015@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa - Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau kabupaten Maros



BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pada hari iniRabu..... tanggal...25... bulan...Juli..... tahun Dua ribu Delapan Belas bertempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama : Wahidah
NIM : 1960302243
Jurusan/Pogram Studi : Manajemen / FEB
Konsentrasi : Keuangan
Judul : Analisis kemampuan keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten pangkep

Dengan Perbaikan :

1. Perbaiki Pembahasan Bab V
2. Pembahasan tiap tabel jelaskan lebih Rinci
3. ✓ Perbaiki Kesimpulan.
- 4.

Berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya.

Diketahui oleh :
Dekan FEB-UMMA,

Dr. Dahlan, SE.,MM

Maros...25... Juli... 2018
Penguji,

IBRIATI KARTIKA ALIMUODIN, SE.MM

Catatan:
Setelah selesai agar diserahkan kembali ke **MAHASISWA**



KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PROPOSAL DAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wahidah
 Nomor Induk Mahasiswa : 1460302243
 Program Studi : Manajemen Keuangan
 Pembimbing I : Prof. Dr. Samsu Alam, S.E., M. Si
 Pembimbing II : Muh. Alam Nasyrah Hanafi, S.E., S.Pd., M.M
 Judul Penelitian : Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pangkep

| MATERI BIMBINGAN | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN I | TANDA TANGAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN II | TANDA TANGAN |
| Senin 02/07/2018 | Konsul hasil penulisan dan penulisan | | Ahad 01/07/2018 | Revisi Objek Penelitian | |
| Minggu 08/07/2018 | Perbaiki pembahasan | | Ahad 08/07/2018 | Tambah struktur, Angka diperbaiki | |
| Minggu 15/07/2018 | Perbaiki Bab V | | Ahad 15/07/2018 | Sumber pada struktur | |
| Rabu 18/07/2018 | Perbaiki Uye | | Rabu 18/07/2018 | ACC Skripsi | |

KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. 40/Perpus-UMMA/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Abdul Rahman, S.Pd.**
Jabatan : **Staf Perpustakaan UMMA**

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : *Usahidah*
Nim : *1460302293*
Fakultas : **FKIP/FAPERTAHTUT/FEB**

Bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi segala kewajiban Perpustakaan sehingga dapat diterangkan bahwa telah mendapat rekomendasi lanjut dari yang berwenang dalam rangka mengikuti Ujian Skripsi Tahun Akademik 2017/2018.

Demikian keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 8 Juni 2018

Staf Perpustakaan Yapim

Abdul Rahman, S.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



WAHIDAH lahir di Maros pada tanggal 16 juni 1990, merupakan anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan Abdul Munir dan Halima. Penulis memulai pendidikan dasarnya di SD NEGERI 07 PULAU KARANRANG pada tahun 1997 dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2002. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya ke sekolah SMP TERBUKA LIUKANG TUPABBIRING dan menyelesaikannya pada tahun 2005. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikannya di MA DDI ALLIRITENGAE MAROS dan tamat pada tahun 2008. Dan beberapa tahun kemudian, penulis melanjutkan studi pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi di UNIVERSITAS MUSLIM MAROS (UMMA), jurusan manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Penulis akhirnya berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2018 ini dengan mengangkat skripsi yang berjudul ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP yang mengantarkannya meraih gelar Sarjana Ekonomi.